

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Purworejo)**

Oleh:

**Fitria Intan Silvaliyana
(20150420273)**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email :

Silvaliyana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine respondents' perceptions of the quality of human resources, the application of financial accounting systems, utilization of information technology, and internal control systems affect the quality of local government financial reports. There are still many cities and districts in Indonesia that get opinions other than unqualified (WTP) from the financial audit board (BPK), or because of demands from users of financial statements for quality local government financial reports, and the researchers' interest in re-testing any factors that affect the quality of financial statements have made researchers motivated to conduct research on the quality of local government financial reports.

Data collection in this study used a questionnaire distributed to respondents who worked at SKPD in Purworejo district. The questionnaires distributed to SKPD employees amounted to 126 questionnaires. However, only 96 questionnaires can be processed. The analysis used in this study is multiple regression analysis.

Based on testing, the results of the hypothesis obtained state that the internal control system has an effect on the quality of local government financial reports. Whereas, the quality of human resources, the application of regional financial accounting systems and the use of information technology do not affect the quality of local government financial reports.

Keywords: Quality of local government financial reports, quality of human resources, application of regional financial accounting systems, utilization of information technology, and internal control systems.

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam berjalannya kegiatan di dalam suatu pemerintahan. Pemerintah merupakan aparatur negara yang memiliki wewenang untuk membuat dan mengatur mengenai sistem yang ada didalamnya. Pemerintah juga selalu memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat. Karena masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang sudah di buat. Namun, masyarakat juga membutuhkan timbal balik dari pemerintah baik berupa perbaikan dalam tatanan pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahannya. Salah satu bentuk adanya transparansi dan akuntabilitas antara pemerintah dengan masyarakat adalah pembuatan laporan keuangan. Salah satu fenomena yang terjadi di dalam roda pemerintahan saat ini adalah fenomena dimana semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas bagi pemerintah.

Al-Qur'an juga telah menyebutkan mengenai kewajiban manusia untuk menyampaikan amanah pada yang berhak dalam surah *An-Nisa'* ayat 58:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa':58)

Ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan kepadanya untuk menerbitkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, ayat ini menegaskan mengenai laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah harus dibuat dan diterbitkan secara utuh, sempurna dan tanpa penundaan kepada pihak yang berhak mendapatkannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya memberikan penilaian berupa opini audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo yang terletak dalam provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir, yaitu pada periode tahun anggaran 2012-2017, didapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo selama periode tahun tersebut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana dari hasil perolehan opini yang tersebut diharapkan pemerintah daerah kabupaten Purworejo dapat mempertahankan opini tersebut untuk tahun-tahun yang akan datang. Perolehan opini WTP Pemkab Purworejo juga diharapkan bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja oleh kabupaten-kabupaten lain yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau pun dibawahnya agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penambahan variabel independen baru yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, perbedaan berikutnya terletak pada lokasi dan sampel penelitian di mana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Dumai, sedangkan pada penelitian kali ini dilakukan pada seluruh SKPD yang berada di bawah pemerintah daerah kabupaten Purworejo..

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Dengan memperhatikan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

***Agency Theory* (Teori Keagenan)**

Teori agensi adalah konsep yang menjelaskan mengenai hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, Jensen dan Smith (1984).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan, Faristina (2011).

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Wati (2014) kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta melalui pemeriksaan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mempunyai karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.

Relevan apabila informasi yang termuat di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dalam mengevaluasi peristiwa di masa lalu, masa sekarang dan masa depan serta dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang material dan jujur dalam penyampaian dari apa yang seharusnya disajikan serta bersifat netral. Kemudian laporan keuangan yang berkualitas apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan, dapat dibandingkan disini dimaksudkan apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun dapat

dibandingkan dengan laporan keuangan di periode yang sama. Selanjutnya, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat di pahami, dimana laporan keuangan dapat berguna bagi pemakainya apabila laporan keuangan tersebut dapat dimengerti oleh pemakainya.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan dari suatu organisasi pemerintahan karena apabila sumber daya manusia di dalamnya memiliki produktifitas yang tinggi dan berkompeten, maka pelaksanaan kegiatannya didalamnya akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya apabila sumber daya manusia yang berada didalam suatu pemerintahan tidak memiliki produktifitas dan kualitas yang tinggi bisa saja mengakibatkan menurunnya sistem dari pemerintahan tersebut. Kualitas sumber daya manusia dapat menentukan kualitas dari lembaga pemerintahan itu sendiri.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

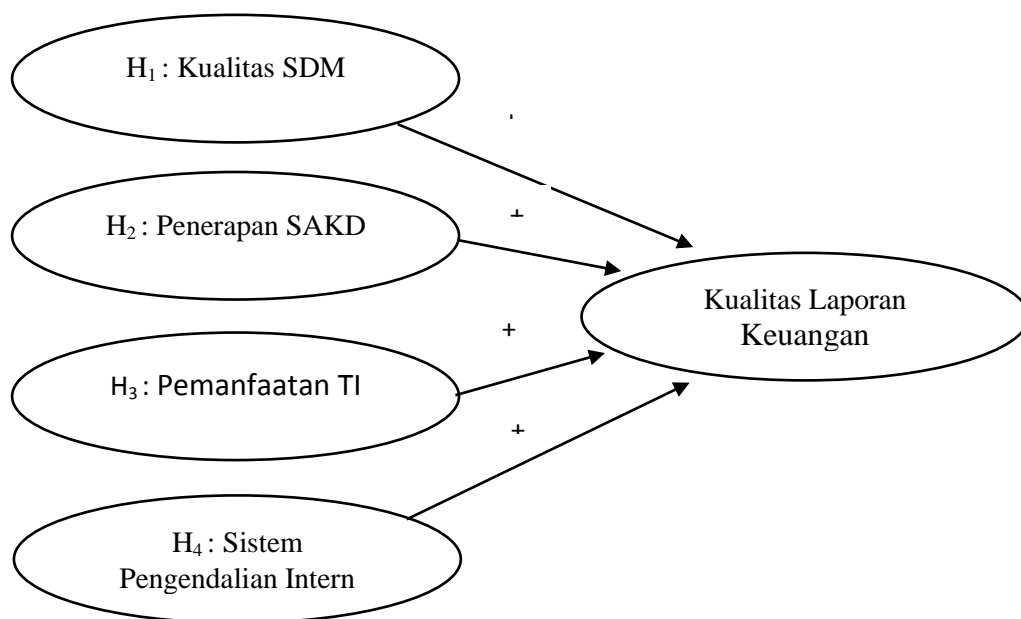
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sesuai dengan penjelasan peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga dapat diartikan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

MODEL PENELITIAN



Gambar 2.1. Rerangka Pemikiran

OBYEK DAN SUBYEK PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang terdapat pada 42 SKPD Purworejo. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di masing-masing SKPD yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

JENIS DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh dengan pemberian kuesioner kepada pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing SKPD.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara memberikan kuesioner terhadap responden. Sedangkan, teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan cara *purposive sampling* dimana melakukan pengambilan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Kuisisioner akan dibagikan dan diisi oleh responden, kemudian kuisisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti. Pengukuran Variabel independen serta dependen dari jawaban responden digunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban.

PENGUKURAN VARIABEL

Variabel Dependen (Y)

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang telah dikembangkan oleh Roviyantje (2012). Kuesioner ini terdiri dari 11 item pernyataan dengan indikator yang terdiri dari kemampuan laporan keuangan untuk menggambarkan aktivitas keuangan pada periode yang telah berlalu dan periode yang akan datang, penyajian laporan keuangan yang tepat pada waktunya, ketersediaan informasi untuk pengambilan keputusan, kewajaran dan kejujuran, laporan keuangan yang dapat dibandingkan dan dipahami serta kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (standar akuntansi pemerintahan). Pengukuran pada variabel dependen ini akan menggunakan 5 skala likert.

Variabel Independen (X)

Kualitas Sumber Daya Manusia (X₁)

Pada penelitian ini, variabel kualitas sumber daya manusia akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari penelitian Ariesta (2013).

Kuesioner ini akan terdiri dari 5 item pernyataan yang telah disesuaikan dengan konteks laporan keuangan pemerintah daerah. Indikator yang akan dijadikan sebagai pengukur pada variabel kualitas sumber daya manusia adalah pemahaman mengenai akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai, pembagian peran dan tanggung jawab, pelatihan terhadap keahlian untuk menyelesaikan tugas. Item-item disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah, skala pengukuran yang digunakan adalah 5 poin skala likert.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂)

Pengukuran variabel menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurillah dan Muid (2014). Jumlah item pertanyaan adalah 8 item dengan skala pengukuran yang digunakan adalah 5 poin skala likert. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan indikator yaitu, kesesuaian sistem dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti disetiap transaksi, pencatatan kronologis, pengklasifikasian transaksi, laporan keuangan setiap periode, pelaporan yang konsisten dan periodik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₃)

Variabel pemanfaatan teknologi informasi akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013). Kuesioner ini akan berisi 6 item pernyataan yang akan diukur dengan menggunakan indikator berupa tingkat kesesuaian sistem akuntansi dengan standar akuntansi pemerintahan, keberadaan jaringan internet dan pemanfaatannya, keberadaan aplikasi untuk proses transaksi, komputersasi atas laporan keuangan dan kesesuaian software yang digunakan terhadap undang-undang. Skala pengukuran yang digunakan adalah 5 poin skala likert.

Sistem Pengendalian Internal (X₄)

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan kuesioner yang berasal dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Ariesta (2013). Kuesioner ini akan berisi 8 item pernyataan yang diukur dengan menggunakan indikator yang terdiri dari Standar Operating Procedure (SOP), implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 60, ketersediaan yang memadai atas dokumen dan catatan, pembagian wewenang serta tindakan disiplin terhadap suatu pelanggaran.

Skala pengukuran yang digunakan pada variabel pengendalian intern akuntansi adalah 5 poin skala likert.

Uji Kualitas Instrumen Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Ghozali (2011) mengungkapkan bahwa uji validitas data adalah uji yang digunakan untuk mengukur sudah valid atau belumkah suatu kuesioner. Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan *Factor Analysis*, dimana suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai *component matrix* $> 0,4$, Nazaruddin (2006).

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat ukuran konsistensi dan juga kestabilan dari sebuah konsep alat ukur atau instrumen yang digunakan, sehingga nilai yang telah diukur tidak akan berubah, Al-Fithrie (2015). Pengujian reliabilitas pada penelitian ini adalah dengan melakukan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$, Gholzali (2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah didalam suatu model regresi yang dipakai dalam penelitian, residualnya berdistribusi normal atau tidak. Hal ini disebabkan karena uji t dan uji F memiliki asumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Pada penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig $> 0,05$ (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah di dalam suatu model regresi linear berganda ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel independennya atau tidak. Seharusnya diantara variabel independen tidak terdapat korelasi yang tinggi agar dapat dikatakan baik. Pada penelitian ini pengujian Multikolinieritas dengan

menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Model regresi dikatakan tidak mengalami multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 (Ghozali, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

Menurut pendapat Ghozali (2011), Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mencari tau apakah didalam model regresi yang digunakan dalam penelitian terjadi sebuah ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mengetahui masuk ke homoskedastisitas atau heteroskedastisitas kah model regresi yang digunakan, maka peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan Uji *Spearmenn Test*. Apabila nilai Sig lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5%, maka model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai sig lebih kecil dari 5%, maka terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis dan Analisa Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan mengenai suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Ghozali (2011)

Regresi Linear Berganda

Adapun model regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e.$$

Keterangan:

Y = Kualitas informasi akuntansi

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi

X1 = Kapasitas sumber daya manusia

X2 = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

X3 = Pemanfaatan teknologi informasi

e = Error

Uji Nilai F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dipakai dalam model penelitian tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependen, Ghazali (2011). Uji F dilakukan dengan cara membandingkan nilai sig F dengan α (0,05). Jika sig F < α (0,05) maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel terikat terhadap variabel bebas.

Uji Nilai t

Uji nilai t adalah uji yang digunakan untuk menjelaskan mengenai seberapa besar pengaruh yang dapat dihasilkan oleh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen, Ghazali (2011). Kriteria hipotesis jika diterima yaitu, (1) Nilai sig < α 0,05; (2) Koefisien regresi searah dengan hipotesis.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Menurut Ghazali (2011), Uji koefisien determinasi (Adj. R²) adalah uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari suatu model yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dinilai sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel terikat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek/Subyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pegawai yang terdapat pada 42 SKPD Purworejo. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di masing-masing SKPD yang memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Penyebaran dan pengembalian kuesioer dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019. Peneliti mengambil sampel pada 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Purworejo, yang terdiri atas 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 16 Dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, 4 Badan, 1 Kantor, 1 RSUD, dan 16 Kecamatan.

Peneliti menyebarkan 126 kuesioner dimana pada masing-masing SKPD diambil 3 responden. Sedangkan kuesioner yang kembali berjumlah 111 buah, dari 111 kuesioner yang kembali terdapat 10 responden yang tidak memenuhi kriteria dan terdapat 5 kuesioner yang tidak lengkap dalam pengisian jawabannya sehingga kuesioner yang dapat di olah berjumlah 96 kuesioner.

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan dan lama bekerja. Berikut merupakan hasil dari distribusi frekuensi setiap karakteristik dari 96 responden. Dari 96 responden, sebagian besar responden yaitu sebanyak 51 orang dengan persentase 53,1% adalah laki-laki dan sebanyak 45 orang dengan persentase 48,9% adalah perempuan. Berdasarkan tingkat umur, mayoritas umur responden lebih dari 41 tahun dengan presentase 63,6%, umur responden yang mendominasi kedua berkisar antara 25 – 40 tahun dengan presentase 33,3%. Selebihnya umur responden berada pada kisaran umur lain. Tingkat pendidikan terakhir strata satu (S1) sebanyak 50 (52%) responden kemudian jumlah responden dengan pendidikan terakhir diploma tiga (D3) sebanyak 24 (25%), selebihnya tersebar pada tingkat pendidikan S2, S3, SMK dan SMA.

Jumlah responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 33 (34,4%), manajemen sebanyak 24 (25%) responden selebihnya responden memiliki latar belakang pendidikan lain dan terdapat responden yang tidak mengisi. Berdasarkan tingkat jabatan/ pangkat yang dimiliki yaitu sebanyak 19 (19,8%) responden sebagai Kasubag Keuangan, 21 (21,9%) responden sebagai Bendahara, 38 (39,6%) responden sebagai Pelaksana, 7 (7,3%) responden sebagai staff keuangan dan 11 (11,4%) responden yang tidak mengisikan jabatannya. Berdasarkan lama bekerja di SKPD saat ini yaitu selama <1 tahun tidak ada dengan persentase 0%, lama bekerja selama 1-5 tahun sebanyak 25 (26%) responden, kemudian lama bekerja selama 6-10 tahun sebanyak 28 (29,2%) responden dan >10 tahun sebanyak 16 (44,8%) responden.

Uji Kualitas Instrumen Data

Uji Validitas

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen KLKPD

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	KLKPD1	0,810 > 0,50	,789	Valid
2	KLKPD2		,653	Valid
3	KLKPD3		,715	Valid
4	KLKPD4		,731	Valid
5	KLKPD5		,780	Valid
6	KLKPD6		,593	Valid
7	KLKPD7		,606	Valid
8	KLKPD8		,832	Valid
9	KLKPD9		,742	Valid
10	KLKPD10		,707	Valid
11	KLKPD11		,553	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen SDM

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	SDM1	0,873 > 0,50	,643	Valid
2	SDM2		,758	Valid
3	SDM3		,681	Valid
4	SDM4		,798	Valid
5	SDM5		,827	Valid
6	SDM6		,706	Valid
7	SDM7		,741	Valid
8	SDM8		,770	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen SAKD

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	SAKD1	0,855 > 0,50	,734	Valid
2	SAKD2		,713	Valid
3	SAKD3		,784	Valid
4	SAKD4		,820	Valid
5	SAKD5		,713	Valid
6	SAKD6		,799	Valid
7	SAKD7		,660	Valid
8	SAKD8		,774	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen PTI

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	PTI1	0,835 > 0,50	,804	Valid
2	PTI2		,852	Valid
3	PTI3		,838	Valid
4	PTI4		,683	Valid
5	PTI5		,785	Valid
6	PTI6		,820	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Dependen SPI

No	Bukti Pernyataan	Nilai KMO	Component Matrix	Keterangan
1	SPI1	0,823 > 0,50	,815	Valid
2	SPI2		,825	Valid
3	SPI3		,812	Valid
4	SPI4		,548	Valid
5	SPI5		,833	Valid
6	SPI6		,849	Valid
7	SPI7		,514	Valid
8	SPI8		,596	Valid

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua dimensi penelitian dikatakan valid karena telah memiliki nilai KMO > 0,50 serta memiliki nilai component matrix > 0,50. Dengan demikian 41 kuesioner dikatakan valid digunakan dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
KLKPD(Y)	0,882	Reliabel
SDM(X1)	0,888	Reliabel
SAKD(X2)	0,886	Reliabel
PTI(X3)	0,869	Reliabel
SPI(X4)	0,896	Reliabel

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7
Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-smirnov	Unstandardize Residual
Nilai Kolmogorov-smirnov	1,037
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,232

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Berdasarkan Tabel 4.15. diatas dapat diketahui bahwa nilai dari Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,232 > 0,05$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolenieritas

Tabel 8
Uji Multikolenieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,551	1,814	Tidak terjadi multikolenieritas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,349	2,863	Tidak terjadi multikolenieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,490	2,040	Tidak terjadi multikolenieritas
Sistem Pengendalian Intern	0,379	2,638	Tidak terjadi multikolenieritas

(Sumber : Data primer – diolah 2019).

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Sig	Kesimpulan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,880	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan	0,963	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,784	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern	0,887	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Statistik Deskriptif

Tabel 10
Tabel Statistik Deskriptif

Variabel	N	Teoritis		Aktual		
		Kisaran	Mean	Kisaran	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Pemda	96	11-55	33	39-55	45,99	3,837
Kualitas Sumber Daya Manusia	96	8-40	24	22-40	33,00	3,299
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	96	8-40	24	27-40	33,95	3,123
Pemanfaatan Teknologi Informasi	96	6-30	18	18-30	25,24	3,500
Sistem Pengendalian Intern	96	8-40	24	26-40	34,41	3,144

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 12
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	836,913	4	209,228	33,874	,000 ^a
Residual	562,076	91	6,177		
Total	1398,990	95			

(Sumber : Data primer – diolah 2018)

Nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ dengan nilai f hitung sebesar 33,874. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji signifikan parsial (Uji t)

Uji hipotesis pertama (H_1)

Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,288 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,111. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini tidak mendukung atau ditolak.

Uji hipotesis kedua (H_2)

Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,212 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,173. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini tidak mendukung atau ditolak.

Uji hipotesis ketiga (H_3)

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,471 > 0,05$ dan koefisien regresi sebesar -0,075. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini tidak mendukung atau ditolak.

Uji hipotesis keempat (H₄)

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari Tabel 4.8 sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,810. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dijelaskan secara parsial, variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis keempat (H₄) dalam penelitian ini mendukung atau diterima.

Tabel 13
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₂	Penerapan standar akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₃	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H ₄	Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Diterima

(Sumber : Data primer – diolah 2019)

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,581. Ini berarti 58,1% variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Variabel kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya sebesar 49,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan (Intepretasi)

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,288 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,068. menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dikatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang juga berkualitas, karena sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menghasilkan keluaran (*output*) secara efisien dan efektif. Akan tetapi hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena masih terdapat sebagian pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pada tingkat pemerintah daerah kabupaten Purworejo tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Dimana uraian proses dan fungsi akuntansi/keuangan hanya bisa dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki wawasan atau ilmu di bidang akuntansi. Pegawai yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan bendahara di SKPD Purworejo juga belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kemampuan para pegawai dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah..

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yenny et al (2016) yang berpendapat bahwa variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar $0,212 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 1,256. Dikatakan bahwa, semakin baik sistem akuntansi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula

laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Akan tetapi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena kabupaten Purworejo belum sepenuhnya melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah dalam membuat laporan keuangan. Dimana dalam penerapan sistem akuntansi pada SKPD belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, karena dalam menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam penyediaan informasi, namun pada kenyataannya SKPD kabupaten Purworejo belum bisa memberikan informasi tentang laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Jadi jelas bahwa untuk memperoleh kualitas laporan keuangan daerah sesuai dengan SAP harus melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik pula.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ihsanti (2014) yang berpendapat bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,471 > 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar $-0,723$. Dikatakan bahwa, semakin banyak pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah disebabkan karena masih terdapat beberapa daerah di kabupaten Purworejo yang masih belum sepenuhnya terkena jaringan koneksi internet dengan lancar, kemudian pemahaman pegawai mengenai teknologi

informasi yang masih kurang serta sarana dan prasarana yang digunakan seperti komputer, *software* maupun *hardware* yang masih kurang mendukung. Sebagian besar pegawai yang ada pada SKPD kabupaten Purworejo berumur antara 41 tahun hingga 55 dengan presentase sebesar 41,7%. Akan tetapi persentase usia pegawai diatas 55 tahun juga masih tersedia atau dapat dikatakan tidak kecil, yaitu sebesar 21,9%. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai, karena umur merupakan faktor yang menunjang potensi seseorang untuk berkembang lebih maju dalam memantapkan pekerjaannya akibatnya tidak semua pegawai memahami penggunaan teknologi informasi seperti penggunaan internet dan pemanfaatan *software*.

Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramudiarta (2015) yang berpendapat bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan diperoleh nilai t hitung sebesar 6,151. Semakin kuat sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Sistem pengendalian intern memiliki peran sebagai pengarah, pengukur dan pengawas yang juga berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pada dasarnya terdiri dari sekumpulan kebijakan dan prosedur yang secara khusus disusun untuk menjamin berjalannya suatu kegiatan dan ditaatinya suatu peraturan yang berlaku agar efisiensi dalam pengelolaan keuangan dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liza Mutiana (2017); Armel (2017); Kiranayanti (2016) yang telah membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah. Berikut hasil dari penelitiannya :

1. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,288 < 0,05$ dan dengan t hitung sebesar 1,068. Hal ini didukung hipotesis yang dikembangkan oleh Yenny et al (2016)
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,212 < 0,05$ dan dengan t hitung sebesar 1,256. Hal ini didukung hipotesis yang dikembangkan oleh Ihsanti (2014).
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,471 < 0,05$ dan dengan t hitung sebesar -0,723. Hal ini didukung hipotesis yang dikembangkan oleh Pramudiarta (2015).

Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan dengan t hitung sebesar 6,151. Hal ini juga sejalan dengan hipotesis yang dikembangkan oleh Liza Mutiana (2017); Armel (2017); dan Kiranayanti (2016).

B. Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada 4 variabel yang digunakan untuk menguji kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari variabel kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi.
2. Penelitian ini terbatas pada metode penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data, sehingga terdapat beberapa kelemahan yaitu jawaban responden tidak jujur dan serius serta ada kemungkinan responden tidak paham dengan pernyataan yang diajukan.
3. Kuesioner pada penelitian ini masih terdapat pernyataan-pernyataan yang negatif yang mengakibatkan hasil dari beberapa variabel independen pada penelitian ini tidak diterima.
4. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang berasal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) kabupaten Purworejo.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah wawancara dalam penelitian ini untuk hasil yang lebih maksimal.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti kembali pernyataan pada kuesioner yang akan disebarakan atau melakukan uji validitas terlebih dahulu.
4. Peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan sampel yang berasal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di satu daerah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Andini, Dewi., dan Yusrawati. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, No. 24(1). Hal 65–82.

Ariesta, Fadila. 2013. ”Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)”. *Skripsi*.

Armel, Raja Yoga Gustika.. 2017. ”Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kereja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai)”. *JOM Fekon*. Vol.4 No.1. Februari. Hal 105-119.

BPK RI www.bpk.go.id. Diakses tanggal 23 Mei 2018 Pukul 13.10

Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*.(VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Hakim, Abdul. 2017. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)”. *JOM Fekon*. Vol. 4 no.1. Februari.

Herawati, Tuti. 2014.”Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)”. *STAR-Study & Accounting Research*. Vol 11 (1).

Jensen, Michael C. and Clifford H. Smith Jr., eds. *The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill, 1984

Kiranayanti dan Erawati. 2016. “Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.16.

Nurillah, As Syifa dan Muid, Dul. 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 3 No. 2.

Nazarudin, Ietje dan Agus Tri Basuki. 2017. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Danisa Media. Yogyakarta

- Pramudiarta, R. 2015. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Kendal)". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Pujanira, Putriratnasari., dan Taman. 2017. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY". *Jurnal nominal*. Vol 6 (2).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang - undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Undang - undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Republik Indonesia. Undang - undang No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Edisi 4, B. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawati, Erma., dan Shinta Permata Sari. 2014. "Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)". Hal. 425-444.
- Wati, Kadek Desiana, dkk. 2014. "Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. Volume 2 Nomor 1.
- Wilkinson, Wales, dkk. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons.

Yeny, Karamoya, H, dan Poputra, A. T. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama”. Jurnal EMBA. Vol.4 No.3 Hal. 682-694.